

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejak manusia dilahirkan begitu banyak masalah yang dihadapi, termasuk masalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Dalam proses mempertahankan kelangsungan hidup manusia dituntut untuk selalu berusaha. Dalam perkembangan usaha manusia untuk mempertahankan hidup dan upaya mencapai keinginan ada kemungkinan tidak lagi sebagai individu, tetapi sebagai suatu kelompok di mana masyarakat harus bekerja sama dalam kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kelompok tersebut, aktivitas manusia untuk mengembangkan hidupnya dalam aspek ekonomi dilakukan secara bersama-sama. Kerja sama ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok sehingga mereka bisa mewujudkan keinginan, harapan dan meraih hidup sejahtera.

Persoalan pembangunan ekonomi yang tidak merata bisa menimbulkan masalah yang besar dalam kehidupan bermasyarakat seperti adanya penindasan terhadap masyarakat lemah, terciptanya ketidakadilan oleh karena sistem ekonomi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Adanya sistem ekonomi yang seperti ini, hanya menguntungkan segelintir orang dan masyarakat menengah ke bawah semakin miskin. Mengatasi hal ini dibutuhkan organisasi sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Organisasi sosial dibangun untuk meningkatkan kemampuan manusia secara mandiri dan bisa membantu memperbaiki ekonomi masyarakat lemah yang selalu ditindas secara ekonomi. Tujuan utama dibentuknya organisasi sosial ialah memungkinkan kehidupan yang sejahtera.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pertengahan abad ke-18 telah mengubah wajah dunia. Berbagai penemuan di bidang industri (revolusi

industri) melahirkan tata dunia ekonomi baru. Tatanan dunia ekonomi terfokus pada keuntungan perseorangan dan bukan lagi pada kebaikan bersama tapi mengarah kepada kaum pemilik modal (Kapitalis). Kaum pemilik modal ini memanfaatkan penemuan baru tersebut dengan tujuan untuk memperkaya diri dan memperkuat kedudukan ekonomi. Hal serakah ini menimbulkan persaingan bebas yang tidak terbatas. Sistem ekonomi kapitalis liberal memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada pemilik modal dan melahirkan kemelaratan serta kemiskinan bagi masyarakat ekonomi lemah.¹

Susunan masyarakat kapitalisme sebagai kelanjutan dari liberalisme ekonomi membiarkan setiap individu bebas bersaing dengan tujuan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya dan bebas pula mengadakan segala macam kontrak tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Akibat dari hal ini sekelompok kecil pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat dan mereka hidup dalam kelimpahan ekonomi. Sedangkan kelompok masyarakat lemah kedudukan ekonominya semakin mendesak.²

Krisis ekonomi tahun 1997/1998 telah memberikan pelajaran yang sangat mahal dan berharga bagi bangsa Indonesia. Situasi ini telah memaksa Indonesia melakukan perubahan yang perlu untuk dilakukan dalam rangka untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan pada masa silam hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Fundamen pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan negara yang sangat birokratis dan adanya penyalahgunaan wewenang kekuasaan telah menjadi salah satu penyebabnya timbulnya krisis nasional yang berkepanjangan.³

¹ Camellia Fanny Sitepu "Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia", *Jurnal Niagawan*, 7:2 (Medan: Juli 2018), hlm. 61.

² Pandji Anoraga, S.E., M.M dan Dra. Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm. 1.

³ Choiriyah "Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Kemiskinan: Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II". *Jurnal Islamic Banking*, 3:2 (Februari 2018), hlm. 17.

Fenomena kemiskinan di Indonesia sampai saat ini belum bisa diatasi dengan baik. Masih begitu banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Ada begitu banyak penyebab kemiskinan yang terjadi, di antaranya ada masyarakat yang miskin karena tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, faktor pendidikan dan kebijakan pemerintah yang tidak membantu masyarakat miskin. Usaha untuk mencari dan menemukan jalan keluar serta solusi atas masalah kemiskinan merupakan upaya bersama dari semua pihak kepentingan termasuk pemerintah, kalangan politik, dan organisasi masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah global yang seringkali dihubungkan dengan masalah kekurangan dalam berbagai situasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan yang dialami oleh fakir miskin merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan fakir miskin merupakan salah satu upaya strategi nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia.⁴

Dalam pandangan Friedman kemiskinan berarti ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial ini meliputi *pertama*, modal produktif seperti tanah, alat produksi, perumahan, kesehatan. *Kedua*, Sumber keuangan, organisasi sosial politik yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama seperti koperasi, partai politik, organisasi sosial. *Tiga*, Jaringan sosial, pengetahuan dan keterampilan serta informasi yang berguna untuk kemajuan hidup. Sementara menurut Bapennas kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar manusia tersebut meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam,

⁴ Hari Harsono, ‘‘Kemiskinan di Perkotaan’’ (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), hlm. 1-2.

lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dari tindakan kekerasan dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.⁵

Jalaluddin Rahmat mengidentifikasi tiga kelompok ideologi terkait dengan kemiskinan yaitu *Pertama*, Konservatisme yang memandang kemiskinan bermula dari karakteristik khas orang-orang miskin itu sendiri yakni malas, boros, fatalistik. *Kedua* liberalisme memandang bahwa manusia adalah makhluk yang baik tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Orang menjadi miskin karena memiliki posisi yang tidak menguntungkan. *Ketiga*, Radikalisme yang lebih menekankan pada peranan struktur sosial, ekonomi dan politik. Radikalisme memandang bahwa manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang kooperatif, produktif dan kreatif. Orang menjadi miskin karena dieksploitasi.⁶

Dalam perspektif Raiffeisen seorang pendiri koperasi kredit di Jerman menegaskan bahwa orang miskin harus bebas dari ketergantungan dari pihak lain atau hidup mandiri dalam mengatasi persoalan yang mereka hadapi dengan mengandalkan kekuatan yang disebut dengan solidaritas atau kerja sama. Dengan kata lain Raiffeisen tidak hanya menginginkan agar orang miskin memiliki uang dan terbebas dari kelaparan, tapi ia juga ingin memanusiakan mereka dan kuncinya adalah bebas dari ketergantungan pada orang lain atau hidup mandiri, menjadi manusia yang merdeka dan bukan hanya manusia yang bisa makan. Mengikuti cara berpikir Raiffeisen koperasi mesti berorientasi pada kesejahteraan anggota. Tidak menjadikan kumpulan dalam koperasi sebagai sarana untuk mencari keuntungan lebih banyak dengan memanfaatkan partisipasi anggota yang banyak. Koperasi mesti bekerja sesuai dengan prinsip ekonomi dengan mengikuti asas-asas koperasi yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sosial.⁷

⁵ Erwan Agus Purwanto, "Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 10:3 (Maret, 2007), hlm. 231.

⁶ Mutiullah dan Moch Nur Ichwan, "Agama, filsafat dan Kemiskinan" dalam Musahadi, *Kemiskinan di Negeri Makmur, Akar Kebijakan dan Tantangan* (Yogyakarta: KDT 2015), hlm. 11-12.

⁷ Francis Wahono, *Koperasi Kredit (Credit Union) Daulat Rakyat* (Jakarta: Kompas, 2021), hlm. 2-3.

Tingkat kemiskinan di Indonesia pada September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang. Hal ini meningkat jika dibandingkan pada maret 2022 yaitu sekitar 9,54%. Kepala badan kebijakan fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyebutkan alasan tingginya tingkat kemiskinan karena inflasi. Ia mengatakan pada tahun 2022 perekonomian Indonesia dihadapkan pada tekanan inflasi yang bersumber dari peningkatan harga komoditas global, khususnya energi dan pangan. Kenaikan tipis angka kemiskinan pada september 2022 terkait erat dengan kenaikan inflasi bahan pangan pada periode juni, juli, agustus dan september.⁸

Berhadapan dengan semua kegagalan dalam memerangi kemiskinan di Indonesia selama ini, maka sangatlah penting untuk mencari suatu model perekonomian baru tanpa menutup diri terhadap globalisasi ekonomi dunia yang ada. Kegagalan dari sistem perekonomian yang terlalu menekankan peran pemerintah di dalamnya semestinya diganti dengan sistem perekonomian yang menempatkan rakyat sebagai pelaku dan tujuan ekonomi utamanya. Dengan demikian sistem ekonomi kerakyatanlah yang menjadi solusi terakhirnya. Sistem ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat sebagai pelaku dan tujuan ekonomi utamanya. Pemberdayaan rakyat sebagai pilar utama perekonomian nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sebagai pelaku ekonomi di tingkat bawah hal yang paling tepat dilakukan rakyat, khususnya kaum miskin adalah dengan melakukan kegiatan yang mereka ketahui. Jadi yang menentukan kemajuan dan kesejahteraan ialah masyarakat sendiri.⁹

Salah satu cara untuk membantu masyarakat ekonomi lemah atau masyarakat miskin ialah usaha dengan membentuk suatu kelompok dengan tujuan untuk memperbaiki situasi ekonomi keluarga. Ekonomi jenis itu berbeda dengan sistem kapitalisme yang berusaha dengan persaingan bebas dan berbasis pada modal yang kuat. Berhadapan dengan situasi seperti ini masyarakat tentunya

⁸ Almadinah Putri Brilian. "Orang Miskin di RI Naik Jadi 26,36 Juta, Ternyata Ini Biar Keroknya". *Detikfinance Selasa 17 Januari 2023* <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-65200034/orang-miskin-di-ri-naik-jadi-2636-juta-ternyata-ini-biang-keroknya>.

⁹ Heribertus Afandi, "Koperasi Kredit Sebagai Kekuatan Ekonomi Kerakyatan: Suatu Usaha Pengentasan Kemiskinan di Indonesia" (Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere 2009), hlm. 3.

membutuhkan suatu wadah otonom yang mampu membantu masyarakat dan dengan sendirinya masyarakat bisa berpartisipasi aktif serta mandiri dalam membangun serta memperbaiki situasi ekonomi yang mereka alami. Oleh karena itu koperasi dapat dijadikan pilihan alternatif yang sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Koperasi dapat menjadi gerakan pembaruan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Dalam mewujudkan perekonomian nasional untuk kesejahteraan masyarakat kelas bawah koperasi sangat penting karena dapat memandirikan rakyat sehingga rakyat tidak selamanya bergantung pada bantuan pemerintah. Oleh karena itu, dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis memilih judul **PARTISIPASI KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN GUNA MENGATASI KEMISKINAN DI INDONESIA.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dari tulisan skripsi ini adalah, bagaimana partisipasi koperasi untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan guna mengatasi kemiskinan di Indonesia.

1.3 TUJUAN PENULISAN

Karya tulis ini memiliki beberapa tujuan yang tertera dalam tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Khusus

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk memahami partisipasi koperasi dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Umum

Tulisan ini dibuat sebagai salah satu dari sekian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu di Institut Filsafat Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero-Maumere.

1.4 METODE PENULISAN

Metode yang digunakan penulis dalam mengerjakan karya ilmiah ini adalah metode studi kepustakaan. Penulis pertama-tama mencari sumber yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini. Hal yang dilakukan penulis adalah membaca literatur-literatur, artikel, majalah yang membahas tentang masalah kemiskinan, koperasi dan sistem ekonomi kerakyatan. Penulis juga membaca dan mendownload sumber-sumber dari internet, dan membaca berita yang relevan dengan penulisan karya ilmiah ini.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Judul dari penulisan karya ilmiah ini adalah **PARTISIPASI KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN GUNA MENGATASI KEMISKINAN DI INDONESIA**, ini dibagi dalam lima bab.

Bab I, Pendahuluan. Pada bagian ini penulis menjelaskan latar belakang penulisan yang mencakupi rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II, Konsep Koperasi Dan Kemiskinan. Pada bab ini akan dijelaskan sejarah koperasi di dunia dan di Indonesia. Pada bagian lain akan dijelaskan yang mencakupi pengertian, sendi-sendi dasar koperasi, nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip koperasi dan jenis-jenis koperasi serta pengenalan secara umum konsep kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia.

Bab III, Sistem Ekonomi Kerakyatan guna mengatasi kemiskinan di Indonesia, dalam bab III ini akan dijelaskan konsep dari ekonomi kerakyatan, pengertian ekonomi kerakyatan, nilai-nilai dari ekonomi kerakyatan serta tujuan dari ekonomi kerakyatan. Hal lain yang dijelaskan juga strategi dalam pemberdayaan masyarakat dengan mengelola sumber daya yang ada di sekitar masyarakat dan hal yang dilakukan koperasi untuk pemberdayaan masyarakat kecil.

Bab IV, Partisipasi koperasi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan guna mengatasi kemiskinan di Indonesia. Bab IV merupakan bab inti dari penulisan karya ilmiah ini. Dalam pembahasannya akan dijelaskan usaha koperasi dalam membangun ekonomi kerakyatan, koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan, partisipasi koperasi dalam membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia dan usaha yang dilakukan koperasi dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Terakhir dalam bab ini akan dijelaskan usaha koperasi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan, koperasi sebagai lembaga yang otonom, Koperasi Sebagai Asas Kekeluargaan, Koperasi Menghidupi nilai Kebersamaan, Koperasi Lembaga Yang Bersifat Demokratis, Koperasi Menekankan Keadilan.

Bab V, Penutup, bagian penutup, ini terdiri atas dua bagian yaitu saran dan kesimpulan.